

INMENDAGRI ATUR AKTIVITAS NATARU

Presiden Ingatkan Ketidakpastian Global

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap ketidakpastian global yang tengah terjadi.

"Kalau kita lihat di urusan konsumsi, indeks keyakinan konsumen sudah kembali pada posisi normal kembali seperti sebelum pandemi. Kemudian juga retail and sales index sudah mulai merangkak naik menguat seiring pelonggaran mobilitas," kata Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2021 di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (24/11).

Dikatakan, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, capaian pajak, bea dan cukai terpantau berjalan baik. Namun, Presiden mengingatkan untuk tetap memperhatikan ketidakpastian global.

Presiden juga mengapresiasi jajaran pemerintah dalam ranah keuangan atas kerja samanya dalam menghadapi permasalahan selama masa pandemi. Permasalahan tersebut membutuhkan kehati-hatian

karena sulit untuk dikalkulasi.

Sementara itu terkait penanganan pandemi Covid-19, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Inmendagri No 62 Tahun 2021 mulai berlaku 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Mendagri menginstruksikan agar kepala daerah mengaktifkan kembali fungsi Satgas Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, maupun Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama pada 20 Desember 2021.

Selain itu, menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai

sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment). Pemerintah Daerah juga diinstruksikan melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021.

Gubernur, walikota, dan bupati diinstruksikan melakukan sosialisasi peniadaan mudik Natal dan tahun baru kepada warga dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya. Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi lainnya, melaksanakan pengetatan dan pengawasan proses di gereja/tempat ibadah pada saat perayaan Natal 2021, tempat perbelanjaan dan tempat wisata lokal dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN dan swasta selama periode tersebut juga dilarang cuti. (Sim/Ati)-d

Guru Sambungan hal 1

implikasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin cepat. Selain profesional, guru mestinya juga dituntut menjadi sahabat terbaik bagi anak didiknya. Sekolah harus menyenangkan sehingga murid akan nyaman. Tuntutan ini mutlak karena menurut Gordon Stokes, 80% kesulitan belajar berasal dari stres. Demikian pula menurut Rose and Mitchell (1997) 82% anak-anak usia 5-6 tahun memiliki penilaian diri yang positif terhadap kemampuan belajar, namun penilaian ini menurun sampai 18% pada usia 18 tahun akibat berbagai sebab.

Terbitnya Undang-undang Tentang Guru dan Dosen yang mengharuskan setiap guru harus memiliki sertifikat memunculkan pertanyaan singkat : siapa yang harus menyertifikasi? Orang pasti akan menoleh dan menjawab : ya LPTK! Namun persoalan tetap mengekori. Karena LPTK di negeri ini telah berubah kelamin--setidaknya mereka memperluas kewenangannya dengan menambah 'ilmu murni' (sebuah istilah gubahan untuk membedakannya dengan ilmu kependidikan). Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah, jika LPTK telah menjadi universitas dan memperluas kewenangannya, apakah mereka dapat dipercaya masih memiliki keahlian 'khusus' di bidang ilmu kependidikan ?

Pada tahun 1990-an di KR ini, saya menulis tentang padanan IKIP dengan AKABRI (waktu itu). Karena militer adalah profesi yang khas yang tidak dapat digantikan seseorang yang tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus tentang kemiliteran, maka pemerintah tidak berani main-main. Misalnya mengizinkan pendirian AKABRI Swasta, atau setidaknya mendirikan AKABRI di berbagai tempat.

Untuk mendapatkan keahlian khusus harus dikembangkan sistem pembelajaran yang spesifik, detail, dan teliti. Mulai dari kurikulum, sistem rekrutmen mahasiswa, sistem rekrutmen

staf pengajar, metoda pembelajarannya, dan sebagainya. Pendidikan tidak sekadar menamakan keahlian dan keterampilan kepada seseorang. Namun juga pandangan hidup dan nilai-nilai kehidupan.

Menyebut kata 'profesi' meminta banyak konsekuensi, yang membentang mulai dari : sistem pendidikan guru, sistem rekrutmen, penempatan, sistem pembinaan karier, dan yang tak kalah pentingnya : kesejahteraan guru yang layak. Sebenarnya tanpa dicanangkannya pun, semua orang tahu bahwa guru itu sebuah profesi sama halnya dokter atau pengacara.

Houle (dalam Suryanto,2005) memberikan ciri-ciri profesionalisme sebagai berikut : 1). Harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat ; 2). Harus berdasarkan kompetensi individu (bukan KKN) ; 3). Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi; 4). Ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antarsejawat; 5). Adanya kesadaran profesional yang tinggi; 6). Memiliki konsep-konsep kode etik; 7). Memiliki sistem sanksi profesi; 8). Adanya militansi individual; dan 9). Memiliki organisasi profesi.

Berbeda dengan perwira militer dan Polri yang dihasilkan dari satu sumber yang jelas diawasi, dibiayai secara 'aduhai'. Pan pola rekrutmen yang hampir standar, institusi penghasil guru sangat beragam. Bahkan tahun 90-an, di Jawa, hampir di setiap kabupaten memiliki lembaga penghasil guru, baik yang melalui tatap muka, jarak jauh, atau yang hanya *nebang* di gedung SD.

Masalahnya kini universitas eks IKIP sudah tidak memusatkan dirinya lagi sebagai lembaga khusus yang menghasilkan guru (bermutu). Pertanyaannya, perlukah kini ada lembaga khusus tidak memusatkan perhatiannya kepada ilmu kependidikan, ilmu pendidikan, dan ilmu keguruan? Ini mengingat pesatnya perubahan zaman. (Penulis adalah Guru Besar Unnes Semarang, mengajar calon guru)-d

DIHANTAM OMBAK LAUT SELATAN

Kapal Terbalik, 3 Nelayan Selamat

WONOSARI (KR) - Perahu nelayan yang tengah melaut di perairan selatan Kapanewon Girisubo Gunungkidul, Rabu (24/11), terbalik. Seluruh penumpang yakni Anton (41) sebagai tekong (pemilik perahu), Ristianto (35) dan Zaenal Arifin (41), selamat, namun dalam keadaan terluka.

Koordinator SAR Satlinmas Wilayah I Provinsi DIY Sunu Handoko Bayu Segara SIP menyatakan, kejadian tersebut dilaporkan beberapa saat setelah kapal dengan ketiga penumpang melaut. "Dari laporan itu kami langsung

melakukan pertolongan dengan menerjunkan Tim SAR berikut peralatannya," katanya.

Berdasarkan kesaksian nelayan setempat, perahu tersebut berangkat dari Pelabuhan Sadeng sekitar pukul 06.00 WIB.

Ketiga nelayan dalam perahu bermaksud menarik jaring penangkap lobster di Tebing Bubukan Kalurahan Songbanyu Girisubo.

Saat menarik jaring itulah, perahu dihantam gelombang tinggi hingga perahu yang mereka tumpangi terbalik dekat tebing.

Gelombang laut saat kejadian mengalami kenaikan cukup kuat, sehingga perahu berbobot kurang dari 10 gross tersebut terhempas dan akhirnya terbalik menghantam tebing.

"Dari ketiga penumpang, ada satu yakni Anton mengalami luka serius dan dilarikan ke Puskesmas terdekat," ujarnya.

Anggota SAR langsung melakukan evakuasi. Proses evakuasi dilakukan dengan kembali membalikan perahu ke dalam posisi semula kemudian menguras air yang memenuhi lambungnya. (Bmp)-f



Tim SAR bersiap melakukan evakuasi di perairan Pantai Sadeng.

Bangkit dan Optimis, Bank Indonesia Kedepankan Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi DIY 2022

YOGYA (KR) Perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengalami pertumbuhan positif dari awal tahun 2021 seiring dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan akselerasi program vaksinasi untuk mencapai Herd Immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat.

Bank Indonesia DIY mencatat pada Triwulan I tahun 2021, ekonomi DIY mampu tumbuh positif 5,80 persen (yoy) dan semakin kuat di triwulan II dengan pertumbuhan mencapai 11,87 persen (yoy) di mana menjadi angka pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa.

Pt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Miyono pada pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021 bertajuk 'Bangkit dan Optimis, Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi', Rabu (24/11/2021) mengatakan akumulasi pertumbuhan ekonomi DIY selama 2021 lebih tinggi dari provinsi lain.

"Pada Triwulan III 2021 di tengah kondisi PPKM Darurat Level 4, ekonomi DIY masih mampu mencatatkan pertumbuhan 2,30 persen (yoy). Sehingga jika diakumulasikan dari triwulan I sampai dengan Triwulan III 2021, ekonomi DIY tumbuh 6,51 persen (ctc), jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Jawa (3,23 persen ctc) maupun Nasional (3,24 persen ctc)," jelasnya.

Miyono menjelaskan sinergitas berbagai pihak didukung dengan inovasi yang variatif menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi di DIY meskipun tahun 2021 menjadi tahun kedua sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia.

"Sinergi dan inovasi menjadi kunci pemulihan ekonomi DIY. Bank Indonesia senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, dalam memajukan ekonomi DIY," imbuhnya.

Komitmen dan keseriusan Bank Indonesia DIY dalam pemulihan ekonomi masa pandemi tercermin dari berbagai program kolaborasi pentahelix dengan berbagai pihak yang meliputi Penyelenggaraan Grebeg UMKM DIY, Forum Komunikasi Ekspor Impor DIY, Program Sinergi Pariwisata Ngayogyakarta (Siwignyo), Program Percepatan Digitalisasi Pembayaran, Program



Pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021 bertajuk 'Bangkit dan Optimis, Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi', Rabu (24/11/2021) di Gedung Bank Indonesia DIY

KR - Wulan Yanuarwati

Koordinasi Pengendalian Inflasi Jogja dan Sekitarnya (KOPI JOSS), serta Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

"Bank Indonesia tetap optimis pemulihan ekonomi masih akan terus berlanjut pada tahun 2022, dan memproyeksikan ekonomi DIY pada akhir 2021 tumbuh pada kisaran 5,4-6,2 persen (yoy). Sementara dari sisi capaian inflasi DIY 2021 diperkirakan masih rendah pada kisaran 1,6-2,0 persen (yoy)," papar Miyono.

Optimisme pertumbuhan Ekonomi 2022

Sementara itu, pada tahun 2022 Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5 persen, mengalami kenaikan dari tahun 2021 yakni 3,2-4,0 persen.

Bank Indonesia juga memperkirakan inflansi akan rendah dan terkendali pada sasaran 3±1 persen pada tahun 2022. Adapun defisit transaksi berjalan akan rendah yakni pada kisaran 1,1-1,9 persen.

Stabilitas sistem keuangan diperkirakan dapat terjaga, kecukupan

modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana Pihak Ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0-9,0 persen dan 6,0-8,0 persen pada 2022.

"Ekonomi keuangan digital akan meningkat pesat. Pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce diprakirakan akan mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih Rp48 ribu triliun," ujarnya.

Meski begitu, Miyono menyebut banyak tantangan yang dihadapi dan perlu diwaspadai mengingat pandemi Covid-19 yang belum usai dimana mutasi virus masih terus terjadi sehingga kita tidak boleh lengah.

Di sisi lain, kondisi ekonomi global masih tidak menentu yang berpotensi mendorong imported inflation. Ditambah, tantangan lain terkait daya beli masyarakat yang perlu terus dijaga sejalan dengan stimulus pemerintah yang mulai dikurangi pada tahun 2022.

"Melihat potensi dan risiko ekonomi yang dihadapi DIY kedepan, Bank Indonesia meyakini pada 2022 ekonomi DIY akan tumbuh pada level moderat di kisaran proyeksi 4,8-5,8 persen (yoy), sedangkan inflasi

diperkirakan berada pada kisaran 2,9-3,3 persen (yoy)," jelas Miyono.

Arahan Strategis Gubernur DIY

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyadari bahwa pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat oleh pemerintah pusat guna menekan laju persebaran Covid-19 berdampak terhadap kinerja perekonomian DIY. Hal ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi Triwulan III yang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

"Meski demikian, Pemda DIY meyakini, bahwa perbaikan ekonomi ke depan akan terus terjadi seiring kemampuan kita dalam pengendalian pandemi," ujar Sultan.

Sultan mengarisbawahi perlunya akselerasi vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity yang berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di DIY sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

"Kita tidak cukup hanya bangga, bahwa DIY termasuk tiga daerah dengan progres vaksinasi tercepat. Tetapi kita harus terus

memperluas cakupan vaksinasi hingga ke daerah-daerah terpencil. Dalam hal ini, sinergi bersama diperlukan untuk menjaga agar penyebaran covid-19 tetap rendah," jelasnya.

Sultan menyebut pengembangan ekonomi kreatif menjadi potensi unggulan yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi DIY. Sultan mengajak seluruh stakeholders untuk memberikan perhatian khusus dalam pengembangan bidang ekonomi kreatif dan inovasi teknologi ICT, termasuk mendukung pembiayaannya.

"Predikat DIY sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, menjadikan DIY memiliki modal sosial dan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Khusus dalam hal ini, DIY memiliki keunggulan pada ekonomi kreatif bidang perfilman, animasi, desain grafis, fashion, kerajinan dan kuliner," paparnya.

Sultan juga mengingatkan optimalisasi peran belanja pemerintah, khususnya dalam rangka menjaga daya beli dan menciptakan multiplier-effects. Anggaran belanja pemerintah harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun tidak boleh semata mengejar target beserta SPJ-nya saja.

Sultan juga mengatakan perlunya manajemen silang dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan antar OPD yang sama di tingkat yang berbeda. Hal ini penting agar tidak ada tumpang tindih sehingga program lebih efektif dan berdaya guna.

Selain itu juga perlu kolaborasi dan sinergi lebih kuat diantara pemerintah dan institusi swasta termasuk perbankan untuk mengoptimalkan arah penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta penyediaan infrastruktur dasar.

"Tidak ada artinya sebuah proses perbaikan ekonomi jika hanya dinikmati segelintir orang. Untuk itu perlu digunakan Manajemen-Silang, paling tidak dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan antarOPD yang sama di tingkat yang berbeda," jelas Sultan. (R-1)